KRISIS EKONOMI
DAN KEMISKINAN PEDESAAN II
(Kuliah VIII)

Kaji ulang program JPS

Berdasarkan pengalaman masalah yang nampak kompleks jika dibahas langsung dengan rakyat sendiri bias menjadi sederhana. Meskipun JPS menghadapi masalah dalam pelaksanaannya di lapangan , namun yang paling menarik adalah jika proyek mengatasi krisis ekonomi ini menjadi proyek yang terkonotasi politik (money politik).

Keprihatinan LSM.

Beberapa LSM Nasional yang bergerak dalam pengembangan masyarakat mengeluarkan penyataan yang berisi urgensi untuk menghentikan program JPS untuk digantikan program baru yang lebih mampu memberdayakan masyarakat miskin. Dan ada argumentasi juga jika program JPS dengan dana Rp 17,9 trilyun (1999/2000) diteruskan tetapi sebagian besar dipastikan tidak sampai kesasaran penduduk miskihn yang akan diselamatkan.

Pernyataan sikap LSM tersebut berdasarkan temuan analisis kritis sebagai berikut :

1. Menghentikan program JPS karena
   Menambah beban hutang Negara, mematikan pemberdayaan masyarakat, membuat departemen-departemen berjuang memperoleh alokasi dana, mengutamakan masyarakat miskin baru, mengabaikan kelompok miskin lama, bermuatan politis, melibatkan partisipan semu.
2. Merekomendasikan membentuk program baru :
   Program pemulihan menyangkut kebutuhan dasar, memprioritasikan pada sector pertanian, mengembangkan sector informal, berpijak pada kemampuan masyarakat (community based), menyamakan visi dan kelembagaan dan tenaga professional, desentralisasi program.
3. Mengimbau LSM diseluruh Indonesia agar :
   Intorspeksi (visi, sumber daya dan dana), menggalang kebersamaan, kordinasi pemerintah pusat dan daerah.

Laporan dari propinsi di jawa, menyatakan bahwa kunci pemecahan kemelut JPS atau sumber masalahnya adalah karena JPS dilaksanakan secara terburu-buru dan dijadikan proyek bagi-bagi uang sehingga menjadi kurang terarah.

Maka pemecahan masalah atas masalah yang mendesak adalah :

1. Dihilangkannya sifat sebagai proyek menjadi program rakyat.
2. Dikembalikan pendekatannya pada pola program IDT (Inpres Desa TErpadu) yang sudah dikenal akrab oleh penduduk miskin.
3. Kriteria penduduk miskin diatur oleh masyarakat sendiri bukan oleh pemerintah.

Adalah kurang bijaksana jika kepada warga desa yang sudah demikian tinggi tingkat kewaspadaannya, pemerintah meluncurkan berbagai program yang tumpang tindih sehingga menimbulkan kesan pemerintah sedang banyak dana, padahal dana-dana tersebut diperoleh dari utang luar negeri.

Dalam kondisi krisis pemerintah bisa keliru atau tidak tepat dalam menetapkan sasaran program sebab bias terjadi

1. Jumlah penduduk miskin yang ada bertambah banyak
2. Pemerintah tidak mau mengambil resiko melaksanakan program JPS dimanapun diseluruh Indonesia (adanya ketidak adilan)
3. Adanya kekuasaan-kekuasaan ditangan pimpro2 yang mempunyai wewenang
4. Perlunya penyesusaian dalam kondisi daerah yang berbeda-beda.

Keterlibatan LSM

Keterlibatan LSM sebenarnya merupakan keharusan, tetapi yang terjadi adalah belum terciptanya hubungan akrab antara LSM dan Pemda. LSM sering dianggap hanya ngerecoki ketimbang membantu melancarkan program.

Selanjutnya definisi JPS memang belum pernah ada sehingga membuka peluang pertanyaan jaring pengaman ini sebenernyha buat siapa. Jadi pada dasarnya mereka yang perlu ditolong adalah orang yang benar-benar sedang susah bukan orang yang sedang menikmati krisis. Program JPS ini mendapat banyak kritik dari masyarakat luas maupun LSM.

Skenario Pesimistik Krisis Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi harus dipahami hanya sebagai salah satu indicator makro untuk menunjukkan ada tidaknya kemajuan ekonomi dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan penduduknya. Jadi jika ekonomi Indonesia tahun 1998 mengalami penurunan (kontraksi) -15%sama sekali tidak boleh diartikan kesejahteraan orang Indonesia secara keseluruhan sudah turun drastic. Bahkan berdasarkan laporan konperensi tentang krisis ekonomi Indonesia yang diselenggarakan ANU (Australian Nasional University) November 1998, menyatakan bahwa krisis yang berlangsung di Indonesia pada pertengahan agustus 1997 adalah merupakan krisis terparah di kawasan Asia dewasa ini maupuan dalam sejarah peradaban manusia modern.

Seharunya pernyataan bahwa kontraksi ekonomi -15% tidak hanya diinterpretasikan bahwa yang terkena dampaknya hanyalah sebagian saja (mungkin sebagian kecil) yang selama ini telah menikmatinya, dan bukan seluruh warga masyarakat secara merata.

Mawas diri Pembangunan perdesaan

a. Lemahnya keberdayaan komunitas desa merupakan dampak dari pembangunan di masa lalu yang bercirikan top down, mekanistis, sentralistik dan serba seragam.

b. Munculnya kemajuan fisik-material, namun dibalik itu sesungguhnya terjadi kemandekan atau kemuduran social budaya, melemahkan kemandirian masyarakat, bergantungnya komunitas desa pada bantuan dan petunjuk dari pihak luar.
c. Menguatnya ketergantungan komunitas desa tak lain adalah sumber dari pembangunan berbiaya tinggi. Menunjukkan kemubaziran pembangunan, yang memperdayai diri sendiri sebagai bangsa
d. Rapuhnya fundamental ekonomi Negara yang berdampak pada krisis multidimensi yang berkepanjangan, jauh lebih mendasar dari sekedar krisis ekonomi tetapi masalah social dan masalah lainnya.